

---

**PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD  
PADA STARTUP DIGITAL DI INDONESIA:  
(STUDI KASUS PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK, PT BUKALAPAK.COM TBK,  
DAN PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK)**

Deni Iskandar

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Kristen Krida Wacana

[denny.iskandar@ukrida.ac.id](mailto:denny.iskandar@ukrida.ac.id)

---

**INFO NASKAH**

Diterima : 11 September 2025  
Direvisi : 25 September 2025  
Diterbitkan : 7 Oktober 2025

**ABSTRAK**

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlakuan akuntansi atas aset tak berwujud pada perusahaan startup digital di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan ketentuan PSAK 19. Objek penelitian mencakup tiga perusahaan startup digital yang telah tercatat di bursa, yaitu PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), PT Bukalapak.com Tbk (BUKA), dan PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli/BELI). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen berupa laporan keuangan tahunan beserta catatan atas laporan keuangan selama periode 2023–2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan startup digital cenderung mengakui aset tak berwujud yang diperoleh dari pihak eksternal, sementara aset yang dihasilkan secara internal sebagian besar masih dibebankan sebagai biaya karena belum sepenuhnya memenuhi kriteria pengakuan sebagaimana diatur dalam PSAK 19. Pengukuran awal dilakukan menggunakan model biaya perolehan, dengan amortisasi berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis. Dari sisi penyajian, aset tak berwujud diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar, namun nilai tercatatnya relatif kecil dibandingkan total aset perusahaan. Pengungkapan kebijakan akuntansi pada umumnya telah dilakukan, meskipun beberapa informasi penting, seperti rekonsiliasi nilai tercatat dan pengujian penurunan nilai, belum disajikan secara konsisten. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi penguatan praktik akuntansi pada perusahaan startup digital serta peningkatan kualitas dan transparansi laporan keuangan.

**Kata kunci:** aset tak berwujud, startup digital, PSAK 19, laporan keuangan, Indonesia.

---

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Perkembangan teknologi digital yang pesat serta menguatnya ekonomi berbasis informasi di Indonesia telah mendorong tumbuhnya perusahaan rintisan (startup) digital dalam berbagai sektor. Startup digital umumnya bergerak di bidang platform teknologi, seperti e-commerce, super-app, fintech, dan layanan berbasis aplikasi, yang aktivitas operasionalnya

sangat bergantung pada sumber daya non-fisik. Sumber daya tersebut mencakup perangkat lunak, algoritma, merek, serta basis data pengguna, yang secara konseptual diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Meskipun tidak berwujud secara fisik, aset-aset tersebut memiliki peran strategis dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam konteks akuntansi, perlakuan atas aset tak berwujud diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19 yang mengatur aspek pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Penerapan PSAK 19 menjadi krusial karena ketidaktepatan dalam pengakuan dan pengukuran dapat menyebabkan aset tak berwujud tidak tercermin secara memadai dalam laporan keuangan, sehingga menurunkan relevansi dan keandalan informasi keuangan. Kondisi tersebut berpotensi mengaburkan kontribusi nyata aset tak berwujud terhadap kinerja dan nilai ekonomi perusahaan startup digital.

Secara praktis, perlakuan akuntansi atas aset tak berwujud pada perusahaan startup menghadapi berbagai tantangan, terutama karena sebagian besar biaya yang timbul berasal dari aktivitas internal, seperti penelitian dan pengembangan (*research and development*), pengembangan aplikasi, serta promosi digital. Berbagai studi menunjukkan bahwa perusahaan startup cenderung membebankan biaya-biaya tersebut langsung sebagai beban operasional, tanpa melakukan kapitalisasi secara konsisten sesuai dengan ketentuan standar akuntansi. Akibatnya, nilai sumber daya tak berwujud yang sebenarnya belum sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai penerapan perlakuan akuntansi aset tak berwujud pada startup digital di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian praktik pelaporan dengan PSAK 19 serta implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor, manajemen, dan regulator dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengambilan keputusan berbasis laporan keuangan.

**Tabel :** Ringkasan Literatur Terkait Aset Tak Berwujud dan Perlakuan Akuntansi\*\*

Peneliti	Fokus Kajian	Temuan Utama	Tahun
Arif, Hedi, & Ridwan	Pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud terhadap kualitas laporan keuangan	Pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena meningkatkan relevansi dan keterandalan informasi akuntansi	2025
Firmansyah & Hartanto	Kapitalisasi aset tak berwujud pada perusahaan startup	Startup digital cenderung belum mengkapitalisasi aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal sesuai dengan ketentuan PSAK 19	2019
Kurniawan, Reza, & Gusmiarni	Penerapan PSAK 19 pada perusahaan berbasis teknologi	Praktik perlakuan aset tak berwujud sebagian besar telah sesuai PSAK 19, namun pengungkapan goodwill masih perlu ditingkatkan	2025
Marvin Randy et al.	Peran aset tak berwujud dalam era ekonomi digital	Aset tak berwujud seperti merek, paten, dan modal intelektual memiliki kontribusi signifikan terhadap nilai perusahaan dan daya saing	2024
Mustikasari	Evaluasi perlakuan akuntansi aset tak berwujud pada perusahaan publik	Terdapat ketidakkonsistenan klasifikasi dan pengungkapan aset tak berwujud meskipun telah mengacu pada PSAK 19	2020
Studi literatur PSAK 19	Definisi dan kriteria pengakuan aset tak berwujud	Aset tak berwujud diakui apabila dapat diidentifikasi, dikendalikan, dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan	2024

**Sumber** : Arif, H. N., Hedi, M. N., & Ridwan, M. (2025). Firmansyah, A., & Hartanto, L. (2019). Kurniawan, A., Reza, A., & Gusmiarni, G. (2025). Marvin Randy, R., Togatorop, R., Gusliana, S. A., & Alexander, A. (2024). Mustikasari. (2020). Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *PSAK 19: Aset Tak Berwujud*. Jakarta: IAI.

Berdasarkan sintesis literatur yang dirangkum dalam Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa aset tak berwujud memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta nilai perusahaan, terutama pada entitas yang beroperasi dalam sektor teknologi dan ekonomi digital. Penelitian yang dilakukan oleh Arif, Hedi, dan Ridwan (2025) menunjukkan bahwa penerapan pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud secara tepat sesuai dengan standar akuntansi mampu meningkatkan relevansi dan keandalan informasi keuangan yang disajikan. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi berperan penting dalam merepresentasikan nilai ekonomi riil dari sumber daya non-fisik perusahaan.

Namun demikian, berbagai studi yang menyoroiti perusahaan startup digital mengindikasikan adanya kendala dalam implementasi perlakuan akuntansi aset tak berwujud. Firmansyah dan Hartanto (2019) mengungkapkan bahwa perusahaan startup cenderung belum melakukan kapitalisasi terhadap aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, khususnya biaya pengembangan aplikasi dan platform digital, meskipun aset tersebut berpotensi memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Mustikasari (2020) yang menunjukkan masih adanya ketidakteraturan dalam klasifikasi serta pengungkapan aset tak berwujud, meskipun perusahaan telah merujuk pada ketentuan PSAK 19.

Sebaliknya, penelitian terhadap perusahaan teknologi yang relatif lebih mapan, seperti yang dilakukan oleh Kurniawan, Reza, dan Gusmiarni (2025), menunjukkan bahwa penerapan PSAK 19 umumnya telah berjalan dengan cukup baik, meskipun beberapa aspek pengungkapan, khususnya terkait goodwill, masih memerlukan penyempurnaan. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan tingkat penerapan perlakuan akuntansi aset tak berwujud antara perusahaan berskala besar dan perusahaan startup digital. Selain itu, kajian literatur oleh Marvin Randy et al. (2024) menegaskan bahwa aset tak berwujud, seperti merek, paten, dan modal intelektual, merupakan determinan utama dalam membentuk daya saing perusahaan pada era ekonomi berbasis pengetahuan.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka regulatif terkait aset tak berwujud telah diatur secara jelas melalui PSAK 19, implementasinya pada perusahaan startup digital di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan praktis. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk mengkaji perlakuan akuntansi aset tak berwujud pada startup digital, guna menilai tingkat kesesuaian dengan PSAK 19 serta implikasinya terhadap kualitas dan kredibilitas pelaporan keuangan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Aset Tak Berwujud dan Standar Akuntansi**

Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik, namun dapat diidentifikasi serta mampu memberikan manfaat ekonomi di masa depan, seperti paten, merek, perangkat lunak, hak cipta, dan modal intelektual. Pengertian serta kriteria pengakuan aset tak berwujud diatur secara komprehensif dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19, yang menegaskan bahwa suatu aset tak berwujud hanya dapat diakui apabila entitas mampu mengidentifikasi aset tersebut secara andal, memiliki kendali atas

sumber daya yang bersangkutan, serta terdapat probabilitas bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang.

Ketentuan dalam PSAK 19 tersebut selaras dengan standar akuntansi internasional IAS 38 yang digunakan secara luas sebagai rujukan global dalam perlakuan akuntansi aset tak berwujud. Dalam konteks penerapan di Indonesia, PSAK 19 terakhir direvisi pada tahun 2015 dan termasuk dalam standar yang berlaku efektif per 1 Januari 2023.

Salah satu kontribusi utama PSAK 19 adalah penyediaan kerangka konseptual dan prosedural yang jelas terkait pengakuan, pengukuran awal, serta pengukuran setelah pengakuan aset tak berwujud. Kerangka ini membantu entitas dalam menyajikan informasi keuangan yang lebih relevan, andal, dan dapat dibandingkan, khususnya dalam merefleksikan nilai ekonomi dari sumber daya non-fisik yang dimiliki perusahaan.

### **Praktik Kapitalisasi di Startup Digital**

Penelitian Firmansyah dan Hartanto (2019) menelaah praktik kapitalisasi aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal pada startup digital berbasis teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi berbagai kendala dalam pencatatan dan pengelompokan biaya riset dan pengembangan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi dan platform digital. Dalam praktiknya, biaya-biaya tersebut lebih sering dibebankan langsung sebagai beban operasional dibandingkan dikapitalisasi sebagai aset, meskipun secara konseptual berpotensi memenuhi kriteria pengakuan sesuai PSAK maupun SAK ETAP. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara praktik akuntansi startup yang dinamis dengan ketentuan formal dalam standar akuntansi.

### **Penerapan PSAK 19 di Perusahaan Lain sebagai Acuan**

Meskipun penelitian ini berfokus pada startup digital, kajian terhadap perusahaan besar tetap relevan sebagai bahan pembandingan. Kurniawan, Reza, dan Gusmiarni (2025) meneliti implementasi PSAK 19 pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan menemukan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi sebagian besar aspek pengakuan dan pengungkapan aset tak berwujud sesuai standar. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek pemisahan dan perlakuan goodwill. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk menilai apakah praktik akuntansi aset tak berwujud pada startup digital sejalan atau justru berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang telah lebih mapan.

### **Peran Aset Tak Berwujud dalam Era Digital**

Kajian literatur yang lebih komprehensif menunjukkan bahwa aset tak berwujud memiliki posisi strategis dalam meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan pada era ekonomi digital. Studi yang dilakukan oleh Marvin Randy dkk. (2024) menegaskan bahwa pengelolaan serta pengungkapan aset tak berwujud secara memadai berperan penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Temuan ini relevan khususnya bagi perusahaan berbasis pengetahuan, seperti startup digital, yang sebagian besar nilai ekonominya bersumber dari aset non-fisik.

### **Pilihan Akuntansi atas Aset Tak Berwujud di Indonesia**

Selain itu, penelitian berjudul *Accounting Choice for Intangible Assets in Indonesia's Entertainment and Media Entities* (2024) menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia memiliki keleluasaan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas aset tak berwujud, baik dalam aspek pengakuan maupun pengukuran, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing aset. Studi ini memberikan gambaran bahwa keputusan antara mengkapitalisasi

atau membebankan aset tak berwujud sangat dipengaruhi oleh penilaian manajerial dan kondisi spesifik entitas. Perspektif ini menjadi sangat relevan bagi startup digital yang umumnya menghadapi tingginya biaya pengembangan internal dan kompleksitas dalam menentukan perlakuan akuntansi yang paling tepat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara sistematis praktik perlakuan akuntansi atas aset tak berwujud yang diterapkan oleh perusahaan startup digital di Indonesia, serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 19. Metode deskriptif tidak diarahkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik aktual yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan.

Pendekatan kualitatif deskriptif dianggap relevan karena fokus penelitian terletak pada penafsiran kebijakan akuntansi, proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tak berwujud, sehingga lebih menekankan pada analisis isi (content analysis) dibandingkan pengujian hubungan sebab akibat secara statistik.

### **Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah perlakuan akuntansi aset tak berwujud yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan startup digital. Subjek penelitian adalah perusahaan startup digital di Indonesia yang memenuhi dua kriteria utama, yaitu: (1) beroperasi pada sektor teknologi digital, seperti e-commerce, platform digital, atau layanan berbasis aplikasi; dan (2) telah mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka, khususnya perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan perusahaan yang telah go public dilakukan untuk menjamin ketersediaan data yang lengkap, transparan, dan dapat diakses secara publik.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Identifikasi aset tak berwujud, dengan menginventarisasi jenis aset tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan startup digital, seperti perangkat lunak, merek dagang, lisensi, serta aset digital lainnya. Analisis pengakuan aset tak berwujud, yaitu menilai apakah aset tersebut telah diakui sesuai dengan kriteria PSAK 19, yang meliputi keteridentifikasi aset, pengendalian oleh entitas, serta potensi manfaat ekonomi di masa depan. Analisis pengukuran dan penyajian, dengan menelaah metode pengukuran awal dan setelah pengakuan, termasuk penggunaan model biaya perolehan, amortisasi, serta pengujian penurunan nilai, serta bagaimana aset tak berwujud disajikan dalam laporan keuangan. Analisis pengungkapan, yaitu mengevaluasi kelengkapan dan kualitas pengungkapan aset tak berwujud dalam catatan atas laporan keuangan berdasarkan ketentuan PSAK 19. Penilaian tingkat kesesuaian dengan PSAK 19, dengan membandingkan praktik perlakuan akuntansi aset tak berwujud yang diterapkan perusahaan startup digital dengan standar yang berlaku untuk menilai sejauh mana kesesuaiannya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengakuan Aset Tak Berwujud**

Berdasarkan hasil telaah terhadap laporan keuangan serta catatan atas laporan keuangan perusahaan startup digital yang menjadi objek penelitian, dapat disimpulkan bahwa aset tak berwujud yang diperoleh melalui pihak eksternal pada umumnya telah diakui secara konsisten sebagai aset dalam laporan posisi keuangan. Jenis aset tak berwujud yang paling banyak dicatat meliputi perangkat lunak yang diperoleh dari pihak ketiga, lisensi pemanfaatan teknologi, serta bentuk tertentu dari hak kekayaan intelektual. Aset-aset tersebut diakui berdasarkan biaya perolehan dan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar sesuai dengan kebijakan akuntansi masing-masing perusahaan.

Praktik pengakuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan startup digital pada dasarnya telah memenuhi kriteria pengakuan aset tak berwujud sebagaimana diatur dalam PSAK 19, yaitu aset dapat diidentifikasi secara jelas, berada dalam pengendalian entitas, serta memiliki potensi memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, pengakuan aset tak berwujud yang bersumber dari pihak eksternal relatif tidak menimbulkan perbedaan interpretasi, mengingat nilai perolehan dan estimasi manfaat ekonominya dapat diukur secara andal.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa perlakuan akuntansi terhadap aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal masih cenderung bersifat konservatif. Biaya yang timbul dari aktivitas pengembangan aplikasi, penyempurnaan platform digital, maupun pengembangan sistem teknologi informasi umumnya dibebankan langsung sebagai beban operasional pada periode terjadinya, dan tidak dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Kondisi ini terutama terjadi pada tahap pengembangan internal yang sulit untuk memisahkan secara jelas antara kegiatan riset dan pengembangan.

Kecenderungan pembebanan biaya pengembangan internal tersebut mencerminkan bahwa perusahaan startup digital menghadapi kendala dalam memenuhi kriteria pengakuan aset tak berwujud internal sebagaimana ditetapkan dalam PSAK 19, khususnya terkait kemampuan untuk membuktikan kelayakan teknis penyelesaian aset, menunjukkan niat serta kemampuan dalam memanfaatkan atau menjual aset tersebut, serta mengidentifikasi dan mengukur biaya yang dapat diatribusikan secara andal.

Selain itu, tingginya tingkat ketidakpastian teknologi, cepatnya dinamika pasar digital, serta perubahan model bisnis yang bersifat adaptif mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam pengakuan aset tak berwujud internal. Pendekatan ini dipilih untuk meminimalkan risiko terjadinya *overstatement* terhadap aset dan laba, meskipun pada sisi lain berpotensi menyebabkan nilai aset tak berwujud yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan nilai ekonomis yang sesungguhnya.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan perlakuan yang cukup jelas antara aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal dan yang dihasilkan secara internal pada perusahaan startup digital. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun perusahaan telah merujuk pada ketentuan PSAK 19, penerapan pengakuan aset tak berwujud internal masih dibatasi oleh permasalahan keandalan pengukuran serta pertimbangan kehati-hatian dalam praktik pelaporan keuangan.

### **Pengukuran Aset Tak Berwujud**

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengukuran awal aset tak berwujud pada perusahaan startup digital pada umumnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan biaya perolehan

(historical cost) sebagaimana diatur dalam PSAK 19. Biaya perolehan tersebut mencakup seluruh pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung hingga aset berada dalam kondisi siap digunakan. Komponen biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan lisensi, pembelian perangkat lunak, serta hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari pihak eksternal. Pendekatan biaya perolehan dipilih karena dinilai lebih objektif, mudah ditelusuri, dan dapat diverifikasi, sehingga meningkatkan tingkat keandalan informasi dalam laporan keuangan, khususnya pada tahap awal pengakuan aset.

Setelah dilakukan pengakuan awal, aset tak berwujud diamortisasi secara sistematis sepanjang umur manfaat ekonomis yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Proses amortisasi bertujuan untuk mengalokasikan nilai tercatat aset ke dalam periode-periode yang memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan aset tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penentuan umur manfaat pada perusahaan startup digital bersifat relatif fleksibel dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing aset, perkembangan teknologi, serta dinamika industri digital yang cenderung berubah secara cepat. Sebagai contoh, perangkat lunak aplikasi yang dikembangkan secara internal umumnya memiliki umur manfaat yang lebih pendek dibandingkan dengan lisensi yang diperoleh secara eksternal, mengingat tingginya risiko keusangan teknologi dan persaingan inovasi yang intensif.

Selain melalui amortisasi, perusahaan startup digital juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemungkinan terjadinya penurunan nilai (*impairment*) atas aset tak berwujud. Sesuai dengan ketentuan PSAK 19, entitas diwajibkan untuk menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai yang material. Meskipun sebagian besar perusahaan telah menyatakan bahwa pengujian penurunan nilai dilakukan, namun metode pengujian serta asumsi yang digunakan sering kali tidak diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pengungkapan aktual dengan ketentuan ideal standar akuntansi, yang berpotensi mengurangi tingkat transparansi dan kegunaan informasi bagi para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, hasil analisis mengindikasikan bahwa pengukuran aset tak berwujud pada perusahaan startup digital menghadapi sejumlah tantangan yang relatif berbeda dibandingkan dengan perusahaan konvensional. Tantangan tersebut antara lain mencakup tingginya ketidakpastian dalam mengestimasi manfaat ekonomi masa depan, khususnya untuk produk digital yang rentan terhadap perubahan teknologi, kesulitan dalam memisahkan biaya riset dan biaya pengembangan dalam aktivitas internal, serta fluktuasi nilai pasar aset digital yang tidak selalu tercermin secara memadai dalam laporan keuangan karena tetap menggunakan pendekatan biaya perolehan.

Dengan demikian, praktik pengukuran aset tak berwujud pada perusahaan startup digital di Indonesia mencerminkan kombinasi antara kepatuhan terhadap ketentuan PSAK 19 dan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence*) oleh manajemen. Meskipun pengukuran awal dan amortisasi telah dilakukan secara sistematis, keterbatasan dalam pengungkapan metode penilaian serta asumsi amortisasi berpotensi menimbulkan risiko salah saji nilai aset, baik dalam bentuk understatement maupun overstatement, yang pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi pengguna laporan keuangan terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan.

### **Penyajian Aset Tak Berwujud**

Berdasarkan temuan penelitian, aset tak berwujud pada perusahaan startup digital disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai bagian dari aset tidak lancar (*non-current assets*), sebagaimana diatur dalam PSAK 19. Penyajian tersebut sejalan dengan karakteristik

aset tak berwujud yang diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi perusahaan, baik melalui pemanfaatan dalam kegiatan operasional, pengembangan produk dan layanan, maupun melalui pemanfaatan lisensi teknologi. Dengan klasifikasi ini, laporan keuangan secara konseptual memberikan gambaran mengenai struktur aset perusahaan serta potensi penciptaan nilai ekonomi di masa mendatang.

Namun demikian, hasil analisis terhadap laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai tercatat aset tak berwujud relatif kecil dibandingkan dengan total aset perusahaan. Kondisi ini tampak pada beberapa startup digital besar seperti GoTo, Bukalapak, dan Blibli, meskipun secara operasional ketiga perusahaan tersebut sangat bergantung pada aset non-fisik. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya potensi understatement atas nilai aset tak berwujud yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, biaya pengembangan internal cenderung dibebankan sebagai beban operasional. Biaya riset dan pengembangan yang timbul dari aktivitas pengembangan aplikasi, platform, dan sistem digital tidak seluruhnya dikapitalisasi karena sulit memenuhi kriteria pengakuan sesuai PSAK 19. Akibatnya, aset tak berwujud internal yang memiliki potensi nilai ekonomi tinggi tidak tercermin secara memadai dalam neraca. Kedua, keterbatasan dalam pengukuran nilai wajar aset digital. Aset digital seperti algoritma, basis data pelanggan, dan konten digital sulit diukur secara andal, sehingga perusahaan lebih memilih pendekatan konservatif dengan hanya menyajikan aset yang memiliki biaya perolehan yang dapat diverifikasi secara objektif. Ketiga, tingginya dinamika teknologi. Startup digital beroperasi dalam lingkungan bisnis yang sangat dinamis, ditandai dengan perubahan teknologi dan preferensi pasar yang cepat. Kondisi ini mendorong manajemen untuk bersikap lebih berhati-hati dalam mengakui dan menyajikan aset tak berwujud jangka panjang, mengingat tingginya risiko penurunan nilai akibat keusangan teknologi.

Kesenjangan antara nilai ekonomi aktual dengan nilai tercatat yang disajikan dalam laporan keuangan menimbulkan implikasi penting bagi para pengguna laporan keuangan, khususnya investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai potensi pertumbuhan dan daya saing startup digital. Meskipun secara formal penyajian aset tak berwujud telah mengikuti ketentuan PSAK 19, keterbatasan dalam aspek pengakuan dan pengukuran menyebabkan laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi aset non-fisik terhadap penciptaan nilai perusahaan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) belum selalu memberikan informasi yang komprehensif mengenai karakteristik aset, metode amortisasi, maupun asumsi penilaian yang digunakan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat transparansi dan relevansi informasi bagi pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mustikasari (2020) serta Firmansyah dan Hartanto (2019) yang menyatakan bahwa praktik pengungkapan aset tak berwujud pada perusahaan digital di Indonesia masih bervariasi dan belum sepenuhnya mencerminkan praktik terbaik sesuai PSAK 19.

Dengan demikian, penyajian aset tak berwujud pada perusahaan startup digital menunjukkan adanya kepatuhan yang bersifat parsial terhadap PSAK 19. Perusahaan relatif telah mampu menyajikan aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal dengan tepat, namun masih menghadapi tantangan besar dalam merefleksikan nilai ekonomi dari aset internal dan aset digital yang justru menjadi inti dari model bisnis startup. Kondisi ini menjadi isu penting dalam upaya peningkatan kualitas dan transparansi pelaporan keuangan di sektor startup digital di Indonesia.

## **Pengungkapan Aset Tak Berwujud**

Berdasarkan hasil telaah terhadap Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) perusahaan startup digital yang menjadi objek penelitian, dapat diketahui bahwa secara umum perusahaan telah mengungkapkan kebijakan akuntansi terkait aset tak berwujud, termasuk metode amortisasi yang diterapkan serta estimasi umur manfaat aset. Praktik ini sejalan dengan ketentuan PSAK 19 yang mewajibkan entitas untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan akuntansi, pertimbangan manajemen, dan metode pengukuran yang digunakan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami dampak aset tak berwujud terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Meskipun demikian, tingkat kelengkapan dan kedalaman pengungkapan masih menunjukkan variasi antar perusahaan. Hasil analisis mengidentifikasi beberapa isu utama sebagai berikut.

Pertama, dasar pertimbangan kapitalisasi atau pembebanan biaya pengembangan belum diungkapkan secara rinci. Beberapa perusahaan, seperti GoTo, hanya menyampaikan kebijakan umum mengenai pengakuan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, tanpa menjelaskan secara spesifik kriteria teknis maupun finansial yang menjadi dasar keputusan apakah biaya pengembangan dikapitalisasi atau dibebankan sebagai beban. Keterbatasan informasi ini menyulitkan pengguna laporan keuangan dalam menilai konsistensi kebijakan akuntansi serta tingkat kehati-hatian manajemen.

Kedua, rekonsiliasi nilai tercatat awal dan akhir periode belum selalu disajikan secara lengkap. Sebagian startup digital hanya mengungkapkan nilai tercatat akhir aset tak berwujud tanpa menyertakan informasi mengenai perubahan selama periode berjalan, seperti penambahan aset, amortisasi, maupun penurunan nilai. Padahal, PSAK 19 menekankan pentingnya rekonsiliasi tersebut untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pergerakan nilai aset tak berwujud sepanjang periode pelaporan.

Ketiga, informasi mengenai pengujian penurunan nilai (*impairment*) masih terbatas. Walaupun perusahaan menyatakan telah melakukan uji penurunan nilai, metode yang digunakan, asumsi utama, serta hasil pengujian jarang diungkapkan secara memadai. Hal ini menjadi isu krusial mengingat aset tak berwujud digital memiliki risiko penurunan nilai yang relatif tinggi akibat cepatnya perubahan teknologi dan dinamika pasar. Tanpa pengungkapan yang memadai, kualitas dan relevansi informasi bagi investor dan pemangku kepentingan menjadi kurang optimal.

Secara umum, praktik pengungkapan aset tak berwujud pada startup digital di Indonesia menunjukkan adanya kepatuhan formal terhadap PSAK 19, namun belum sepenuhnya mencapai tingkat transparansi yang ideal. Beberapa faktor yang mempengaruhi keterbatasan pengungkapan tersebut antara lain kompleksitas dalam mengukur nilai aset digital, ketidakpastian terkait estimasi umur manfaat teknologi, serta dinamika bisnis yang cepat dan perubahan strategi pengembangan produk.

Kondisi ini memiliki implikasi penting terhadap kualitas pelaporan keuangan. Pengungkapan yang terbatas dapat mengurangi kemampuan investor dan pemangku kepentingan dalam menilai kontribusi aset tak berwujud terhadap penciptaan nilai perusahaan, mengidentifikasi risiko penurunan nilai aset digital, serta mengevaluasi konsistensi kebijakan akuntansi manajemen dalam perlakuan biaya pengembangan internal.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kualitas praktik pengungkapan pada perusahaan startup digital, khususnya terkait aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Peningkatan transparansi tidak hanya akan memperbaiki

kualitas informasi keuangan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap nilai ekonomi yang sesungguhnya dimiliki oleh perusahaan startup digital.

Hasil Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut;

**PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) :** Dalam aspek pengakuan, perusahaan mencatat aset tak berwujud yang diperoleh dari pihak eksternal, seperti lisensi, perangkat lunak, dan hak kekayaan intelektual, sebagai aset dalam laporan keuangan. Sebaliknya, aset tak berwujud yang berasal dari pengembangan internal, khususnya pengembangan aplikasi dan sistem digital, pada umumnya tidak dikapitalisasi dan lebih banyak dibebankan sebagai beban operasional.

Dari sisi pengukuran, GOTO menerapkan model biaya perolehan sebagai dasar pengukuran awal, dengan amortisasi yang dilakukan secara sistematis berdasarkan estimasi umur manfaat aset. Perusahaan juga menyatakan melakukan pengujian penurunan nilai, namun metode dan asumsi yang digunakan tidak selalu diungkapkan secara terperinci. Dalam hal penyajian, aset tak berwujud disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar. Nilai tercatat aset tersebut relatif kecil dibandingkan total aset perusahaan, yang mencerminkan bahwa sebagian besar aset digital internal belum dikapitalisasi. Untuk pengungkapan, perusahaan telah menyajikan informasi mengenai metode amortisasi dan estimasi umur manfaat. Namun, pengungkapan terkait dasar pertimbangan kapitalisasi biaya pengembangan, rekonsiliasi perubahan nilai tercatat, serta metode pengujian penurunan nilai masih terbatas.

**PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) :** Pada aspek pengakuan, perusahaan mengakui aset tak berwujud eksternal seperti lisensi dan hak digital sebagai aset. Sementara itu, biaya yang timbul dari pengembangan internal platform digital cenderung dibebankan sebagai beban pada periode berjalan. Pengukuran aset tak berwujud dilakukan dengan menggunakan biaya perolehan sebagai dasar pengakuan awal. Amortisasi diterapkan selama umur manfaat yang ditentukan oleh manajemen, dan pengujian penurunan nilai dilakukan, meskipun informasi yang diungkapkan masih relatif terbatas. Dalam penyajian, aset tak berwujud dikelompokkan sebagai aset tidak lancar. Nilai tercatat yang disajikan relatif kecil jika dibandingkan dengan kontribusi ekonomi sebenarnya dari aset digital internal perusahaan. Dari sisi pengungkapan, perusahaan umumnya hanya menyampaikan kebijakan akuntansi dan metode amortisasi. Informasi mengenai rekonsiliasi nilai tercatat awal dan akhir periode serta asumsi yang digunakan dalam pengujian penurunan nilai belum disajikan secara memadai.

**PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli/BELI) :** Dalam pengakuan, perusahaan mencatat aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal berdasarkan biaya perolehan. Namun, aset yang dihasilkan secara internal sebagian besar tidak dikapitalisasi dan langsung diakui sebagai biaya operasional. Untuk pengukuran, Blibli menggunakan model biaya perolehan sebagai dasar, dengan amortisasi yang dihitung berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis aset. Perusahaan juga melakukan pengujian penurunan nilai secara berkala, tetapi tidak mengungkapkan metode dan hasilnya secara rinci. Dalam penyajian, aset tak berwujud disajikan sebagai aset tidak lancar. Nilai tercatat yang dilaporkan masih mencerminkan sebagian kecil dari total aset digital internal yang sebenarnya memiliki peran penting dalam operasional perusahaan. Dari sisi pengungkapan, perusahaan telah mengungkapkan metode amortisasi dan estimasi umur manfaat. Namun, informasi terkait kapitalisasi biaya internal, rekonsiliasi perubahan nilai tercatat, serta penjelasan mengenai pengujian penurunan nilai masih jarang disampaikan secara komprehensif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis terhadap laporan keuangan tiga perusahaan startup digital, yaitu PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, PT Bukalapak.com Tbk, dan PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli), dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut.

1. **Pengakuan Aset Tak Berwujud.** Startup digital pada umumnya telah secara konsisten mengakui aset tak berwujud yang diperoleh dari pihak eksternal, seperti lisensi, perangkat lunak, dan hak kekayaan intelektual. Sebaliknya, aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, termasuk biaya pengembangan aplikasi dan platform digital, sebagian besar masih dicatat sebagai beban operasional. Kondisi ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian serta pendekatan konservatif dalam implementasi PSAK 19.
2. **Pengukuran Aset Tak Berwujud.** Pengukuran awal aset tak berwujud dilakukan dengan menggunakan model biaya perolehan, disertai amortisasi secara sistematis selama estimasi umur manfaat ekonomis yang ditetapkan oleh manajemen. Meskipun perusahaan menyatakan telah melakukan pengujian penurunan nilai, pengungkapan mengenai metode dan asumsi yang digunakan masih belum memadai, sehingga tingkat transparansi informasi keuangan relatif terbatas.
3. **Penyajian Aset Tak Berwujud.** Aset tak berwujud disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar, yang menunjukkan ekspektasi manfaat ekonomi jangka panjang. Namun demikian, nilai tercatat aset tak berwujud relatif kecil dibandingkan dengan total aset perusahaan, mengindikasikan bahwa kontribusi aset internal terhadap nilai perusahaan belum sepenuhnya terefleksikan dalam laporan keuangan.
4. **Pengungkapan Aset Tak Berwujud.** Perusahaan umumnya telah mengungkapkan kebijakan amortisasi dan estimasi umur manfaat aset. Akan tetapi, pengungkapan terkait dasar kapitalisasi biaya, rekonsiliasi perubahan nilai tercatat, serta metode pengujian penurunan nilai masih terbatas dan menunjukkan variasi antar perusahaan.

Secara umum, praktik perlakuan akuntansi aset tak berwujud pada startup digital di Indonesia telah mengacu pada PSAK 19, namun penerapannya masih bersifat parsial. Terdapat ruang yang cukup besar untuk peningkatan, khususnya dalam hal pengakuan aset internal, pengukuran nilai yang lebih representatif, serta pengungkapan informasi yang lebih komprehensif.

### **Saran**

1. **Bagi Manajemen Perusahaan Startup Digital.** Perusahaan disarankan untuk meningkatkan kapitalisasi aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, terutama biaya pengembangan aplikasi dan platform digital, dengan memperkuat dokumentasi serta penerapan kriteria pengakuan sesuai PSAK 19. Selain itu, perusahaan perlu memperluas pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, khususnya terkait dasar pertimbangan kapitalisasi, rekonsiliasi nilai tercatat, serta metode pengujian penurunan nilai, agar transparansi dan relevansi informasi semakin meningkat.
2. **Bagi Regulator dan Praktisi Akuntansi.** Regulator dan praktisi diharapkan dapat menyediakan panduan tambahan mengenai pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud internal pada startup digital yang beroperasi dalam lingkungan teknologi yang cepat berubah. Di samping itu, perlu didorong praktik pengungkapan yang lebih rinci dan standar guna meningkatkan kredibilitas laporan keuangan startup digital di mata investor dan pemangku kepentingan.

## RUJUKAN PUSTAKA

- Arif, D. N., Hedi, M. N., & Ridwan, M. (2025). Pengaruh pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud terhadap kualitas laporan keuangan. *Journal of Artificial Intelligence & Digital Business (RIGGS)*.
- Firmansyah, A., & Hartanto, L. (2019). Kapitalisasi aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal oleh start-up company. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA)*, PKN STAN. [https://repository.bakrie.ac.id/3618/?utm\\_source=chatgpt.com](https://repository.bakrie.ac.id/3618/?utm_source=chatgpt.com)
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2010/2014). *PSAK 19: Aset Tak Berwujud*. Ikatan Akuntan Indonesia. [https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Umum/20?utm\\_source=chatgpt.com](https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Umum/20?utm_source=chatgpt.com)
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *PSAK 19: Aset Tak Berwujud* (revisi terbaru). Jakarta: IAI.
- Kurniawan, A., Reza, A., & Gusmiarni, G. (2025). Penerapan PSAK aset tak berwujud pada perusahaan berbasis teknologi. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 4(2), 624–634. [https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/article/view/1391?utm\\_source=chatgpt.com](https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/article/view/1391?utm_source=chatgpt.com)
- Marvin Randy, R., Togatorop, R., Gusliana, S., & Alexander, A. (2024). Aset tak berwujud di era modern: Studi literatur. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 8(5). [https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/view/1774?utm\\_source=chatgpt.com](https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/view/1774?utm_source=chatgpt.com)
- Mustikasari, D. (2020). Evaluasi perlakuan akuntansi aset tak berwujud pada perusahaan publik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1), 45–58.
- PT Bukalapak.com Tbk. (2022). *Laporan Tahunan 2022*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Bukalapak?utm\\_source=chatgpt.com](https://en.wikipedia.org/wiki/Bukalapak?utm_source=chatgpt.com)
- PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli). (2023). *Laporan Tahunan 2023*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Blibli?utm\\_source=chatgpt.com](https://en.wikipedia.org/wiki/Blibli?utm_source=chatgpt.com)
- PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. [https://id.scribd.com/document/850207847/GOTO-Laporan-Tahunan-2023-59-63?utm\\_source=chatgpt.com](https://id.scribd.com/document/850207847/GOTO-Laporan-Tahunan-2023-59-63?utm_source=chatgpt.com)
- PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (2024). *Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2024*. [https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From\\_EREP/202403/20250312165608-50025-0/LK%20GOTO\\_31%20Des%202024.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202403/20250312165608-50025-0/LK%20GOTO_31%20Des%202024.pdf?utm_source=chatgpt.com)
- GoTo (Indonesian company). (2025). *Wikipedia*. [https://en.wikipedia.org/wiki/GoTo\\_%28Indonesian\\_company%29?utm\\_source=chatgpt.com](https://en.wikipedia.org/wiki/GoTo_%28Indonesian_company%29?utm_source=chatgpt.com)
- Bukalapak. (2026). *Wikipedia*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Bukalapak?utm\\_source=chatgpt.com](https://en.wikipedia.org/wiki/Bukalapak?utm_source=chatgpt.com)
- Blibli. (2026). *Wikipedia*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Blibli?utm\\_source=chatgpt.com](https://en.wikipedia.org/wiki/Blibli?utm_source=chatgpt.com)
- International Accounting Standards Board. (2009). *IAS 38: Intangible Assets*. IASB. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-38-intangible-assets/>